

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP
TERDAKWA PINANGKI
(Studi Kasus: Putusan Pengadilan Nomor 10/Pid.Sus-
TPK/2021/PT DKI)**

Khairullah

183112330050017



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
2022**

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP
TERDAKWA PINANGKI
(Studi Kasus: Putusan Pengadilan Nomor 10/Pid.Sus-
TPK/2021/PT DKI)**

**Khairullah
183112330050017**

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
2022**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairullah
Tempat, Tanggal Lahir : Rupe, 12 September 1986
Nomor Pokok Mahasiswa : 183112330050017
Fakultas : Hukum
Alamat : Jalan Cipinang Asem Gg. Al Musawar No. 23
Rt. 015 Rw. 02 Kel. Kebon Pala Kec. Makassar
Jakarta Timur
Handphone : 082310240586

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA PINANGKI (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI) adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Semua data yang saya pergunakan dalam skripsi ini dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan/atau menggunakan penelitian lapangan. Bila kemudian terbukti skripsi ini hasil plagiat, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jakarta, 19 September 2022



Khairullah

TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA
TERHADAP TERDAKWA PINANGKI (Studi Kasus:
Putusan Pengadilan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI)

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada tanggal 1 September
2022 dan dinyatakan LULUS dengan nilai A- dan predikat Sangat Memuaskan.

Jakarta, 19 September 2022

Mengetahui,

Dekan

Pembimbing

(Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.Si.)

(Prof. Mohammad Askin, S.H.)

Tim Penguji

Ketua,

Anggota

Anggota

Dr. Diah Ratu Sari, S.H., M.H. Dr. Hamdan, S.H., M.H. Prof. Mohammad Askin, S.H.

TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Khairullah
Nomor Pokok Mahasiswa : 183112330050017
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA
TERHADAP TERDAKWA PINANGKI (Studi
Kasus: Putusan Pengadilan Nomor 10/Pid.Sus-
TPK/2021/PT DKI)

Benar telah diperbaiki berdasarkan petunjuk dari Tim Penguji dalam sidang ujian Skripsi pada tanggal 1 September 2022, sebagaimana tertulis dalam berita acara ujian Skripsi.

Pembimbing



Prof. Mohammad Askin, S.H.

Tim Penguji

Ketua,



Dr. Diah Ratu Sari, S.H., M.H.

Anggota



Dr. Hamdan, S.H., M.H.

Anggota



Prof. Mohammad Askin, S.H.

LEMBAR PERSETUJUAN JUDUL YANG TIDAK DAN/ATAU DIREVISI

Nama Mahasiswa : Khairullah
Nomor Pokok Mahasiswa : 183112330050017
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Tanggal Sidang : 1 September 2022

JUDUL DALAM BAHASA INDONESIA:

ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA
PINANGKI (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT
DKI)

JUDUL DALAM BAHASA INGGRIS:

JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL IMMEDIATE AGAINST THE
DEFENDANT PINANGKI (Case Study: Court Decision Number 10/Pid.Sus-
TPK/2021/PT DKI)

TANDA TANGAN DAN TANGGAL

Pembimbing	Ka. Prodi	Mahasiswa
Tanggal: 01 - 10 - 2022	Tanggal: 03 - 10 - 2022	Tanggal: 03 - 10 - 2022
		
Prof. Mohammad Askin, S.H.	Masidin, S.H., M.H.	Khairullah

ABSTRAK

Program Sarjana Universitas Nasional

Program Studi Ilmu Hukum

Skripsi, (26 Agustus 2022)

- A. Nama Penulis : Khairullah
B. NPM : 183112330050017
C. Judul Tesis : Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Terdakwa Pinangki (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI)
D. Jumlah Halaman : xii halaman dan 90 halaman, 2022.
E. Isi Abstrak:

Pola pemberantasan korupsi dengan menghukum pelaku dengan sanksi pidana yang berat dan bahkan sampai dengan hukuman mati sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tipikor harus ditegakkan untuk mencegah perbuatan korupsi. Namun demikian, dalam praktiknya, sanksi pidana yang diberikan oleh hakim pengadilan kepada pelaku masih ringan, bahkan ketika pelaku tersebut merupakan aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Agung. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI dalam penjatuhan sanksi pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum? Bagaimana penegakan hukum berkeadilan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di masa akan datang? Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menyatakan bahwa pertama, Pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI dalam penjatuhan sanksi pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum bersifat non-yuridis. Kedua, Penegakan hukum berkeadilan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di masa akan datang adalah dengan perluasan terhadap frasa -keadaan tertentu, yang berupa terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum dapat diterapkan pidana mati. Hal tersebut dikarenakan aparat penegak hukum merupakan pihak utama dan terdepan yang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga akan menjadi ironis apabila melakukan tindak pidana korupsi adalah aparat penegak hukum seperti jaksa Pinangki yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi namun justru mendapatkan keringan hukuman.

- F. Daftar Pustaka : 16 Buku (1967—2021)
G. Dosen Pembimbing : Prof. Mohammad Askin, S.H.

ABSTRACT

National University Undergraduate Program

Legal Studies Program

Skripsi, (August 26th 2022)

- A. Author's Name : Khairullah
B. NPM : 183112330050017
C. Title of Thesis : Analysis Juridical Analysis of Criminal Imposition of Defendant Pinangki (Case Study: Court Decision Number 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI)

D. Number of Pages : xii page and 90 pages, 2022.

E. Abstract Contents:

The pattern of eradicating corruption by punishing perpetrators with severe criminal sanctions and even up to the death penalty as stipulated in Article 2 paragraph (2) of the Anti-Corruption Law must be enforced to prevent acts of corruption. However, in practice, the criminal sanctions given by court judges to perpetrators are still light, even when the perpetrator is a law enforcement officer such as the Attorney General's Office. The problem in this study is how the judges of the DKI Jakarta High Court Number 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI consider the criminal sanctions carried out by law enforcement officers? How will the law enforcement be fair against corruption crimes committed by law enforcement officers in the future? This research method is normative juridical using secondary data. The results of the study state that first, the consideration of the judges of the DKI Jakarta High Court Number 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI in imposing criminal sanctions carried out by law enforcement officers is non-juridical. Second, fair law enforcement against criminal acts of corruption committed by law enforcement officers in the future is to expand the phrase "certain circumstances", in the form of corruption crimes committed by law enforcement officers can be applied to the death penalty. This is because law enforcement officers are the main and foremost parties in eradicating corruption, so it will be ironic if the perpetrators of corruption are law enforcement officers such as Pinangki prosecutors who are proven legally and convincingly to commit corruption crimes but instead get leniency.

F. Bibliography : 16 Books (1967—2021)

G. Advisor : Prof. Mohammad Askin, S.H.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT karena atas berkat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Terdakwa Pinangki (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI)**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Sarjana Hukum Universitas Nasional.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terpelajar dan terhormat, orang tua Penulis, M. Kasim, dan Fatimah yang tidak pernah terputus doanya untuk kebahagiaan dan kesuksesan Penulis. Semoga gelar Sarjana Hukum ini merupakan salah satu doa orang tua Penulis yang dikabulkan Allah SWT.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada yang terpelajar, Prof. Mohammad Askin, S.H. sebagai pembimbing Penulis yang telah banyak memberikan bimbingan kepada Penulis dalam penyusunan Skripsi ini. Pada kesempatan ini Penulis sampaikan ucapan terima kasih juga kepada para pihak yang telah memberikan bantuan baik moril dan materiil dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu:

1. Dr. Drs. El Amry Bermawi Putera, M.A. Rektor Universitas Nasional;
2. Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.Si. Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional;
3. Dr. Mustakim, S.H., M.H., Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.

4. Masidin, S.H., M.H., Ketua KaProdi Program Studi Fakultas Hukum Universitas Nasional;
5. Dosen Fakultas Hukum, Program Sarjana, Universitas Nasional;
6. Kakak Penulis, Rusydi yang terus mendukung Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
7. Teman-teman satu angkatan Penulis di Fakultas Hukum Universitas Nasional angkatan 2018, Mustafa Tatroman, S.H. Muhammad Budi Hermawan, S.H., Andi. NadyaFatin Wadianita, S.H., Asri Maulia, S.H., Anindita Firzania, S.H., Ilaidir Rachman, S.S., S.H., M.H., Reyhan Hilawansyah, S.H., Rahmandika Reyhardian, S.H.;
8. Pihak-pihak lain yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu Penulis dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik demi penyempurnaan skripsi ini.

Jakarta, 26 Agustus 2022



Khairullah

DAFTAR ISI

COVER	i
TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI	iii
TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN JUDUL YANG TIDAK DAN/ATAU DIREVISI ..	v
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	xiii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.....	10
E. Metode Penelitian.....	20
F. Sistematika Penulisan	23
 BAB II PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA	
KORUPSI	25
A. Tindak Pidana Korupsi	25
B. Aparatur Penegak Hukum.....	26
C. Penegakan Hukum.....	36
D. Keadilan	45

BAB III PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR 10/

PID.SUS-TPK/2021/PT DKI	53
A. Posisi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 10/ Pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI.....	53
B. Dakwaan dan Tuntutan	54
C. Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 10/Pid.Sus- Tpk/2021/PT DKI.....	56
D. Amar Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2021/ PT DKI.....	57

BAB IV ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP

TERDAKWA PINANGKI	59
A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/ Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum.....	59
B. Penegakan Hukum Berkeadilan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Di Masa Akan Datang.....	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran	90

DAFTAR PUSTAKA